

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 Konsep Pertahanan Negara**

Pertahanan negara diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa pertahanan negara dapat diartikan sebagai segala suatu usaha untuk mempertahankan kedudukan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) menjelaskan bahwa pertahanan negara pada hakikatnya adalah pertahanan negara yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan pertahanan negara ditujukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Upaya pertahanan negara diselenggarakan untuk dapat mencegah dan mengatasi setiap ancaman, baik yang bersifat aktual maupun yang bersifat potensial, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Dalam Upaya menjaga dan melindungi pertahanan negara serta keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa diwujudkan dengan penyelenggaraan pertahanan negara.

Dalam Buku Putih Pertahanan RI (2015) menjelaskan bahwa Pertahanan yang bersifat semesta adalah suatu model yang digunakan serta dikembangkan sebagai pilihan model bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. (Buku Putih Pertahanan RI 2015). Dalam filsafat ilmu secara tinjauan

ontologisnya, ilmu pertahanan adalah ilmu yang mempelajari mengapa dan bagaimana eksistensi sebuah negara dapat dipertahankan kedaulatannya, keutuhan wilayahnya dan keselamatan bangsanya dari segala jenis ancaman, dari dalam dan luar negara tersebut (Tippe, 2016)

Dalam sistem pertahanan semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal yang tinggi. Dipersiapkan secara dini berarti sistem pertahanan semesta dibangun secara berkelanjutan dan terus-menerus, untuk menghadapi berbagai jenis ancaman baik ancaman militer, nonmiliter, maupun hibrida (Buku Putih Pertahanan Negara, 2015).

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat disintesis bahwa pertahanan merupakan suatu usaha dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Dengan sistem pertahanan negara semesta, dalam upaya menjaga kedaulatan bangsa, diperlukan pengintegrasian seluruh komponen bangsa dalam menghadapi ancaman yang aktual dan potensial. Serta pemerintah harus mampu menjalankan fungsinya dalam rangka melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai bentuk ancaman. Karena ancaman bisa bersumber dari luar maupun dari dalam negeri sehingga berdampak pada pertahanan negara.

Pertahanan bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah. Sifat kesemestaan dimanifestasikan dalam kesatuan cara berpikir dan cara bertindak warga negara untuk terlibat dalam usaha-usaha pertahanan negara (Pertahanan, 2015). Adapun 2 jenis pertahanan yang terdapat dalam konsep pertahanan negara, diantaranya:

1. Pertahanan Militer

Kekuatan utama dari pertahanan militer ini adanya komponen utama yaitu TNI yang kemudian didukung oleh komponen cadangan dan

pendukung. Kekuatan pertahanan militer dibangun untuk dapat menghadapi ancaman militer melalui penyelenggaraan operasi militer.

## 2. Pertahanan Nirmiliter

Kekuatan pertahanan militer dibangun untuk dapat menghadapi ancaman nirmiliter dengan menempatkan unsur utama yaitu Kementerian/Lembaga dan unsur lain kekuatan bangsa yang kemudian secara terpadu dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Ancaman nir-militer ini dapat mengarah pada dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, keamanan dan pertahanan (ipoleksosbudhankam).

Konsep pertahanan negara digunakan oleh peneliti untuk dapat melihat ancaman nirmiliter yang terjadi khususnya terkait ancaman perang kognitif pada penyelenggaraan pilkada di Indonesia dengan mencakup pada dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, keamanan dan pertahanan (ipoleksosbudhankam).

### 2.1.2 Konsep Ancaman

Dalam buku putih pertahanan negara (2015) dijelaskan bahwa ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar penyusunan desain sistem pertahanan negara, baik yang bersifat actual maupun bersifat potensial. (Buku Putih Pertahanan Negara, 2015). Penjelasan ancaman menurut Pasal 4 UU No.3 tahun 2002 menyebutkan bahwa “ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.” Bentuk ancaman saat ini dan masa depan dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ancaman militer, nirmiliter dan ancaman hibrida.

Perkembangan lingkungan strategis yang berkembang saat ini, menjadikan ancaman memiliki dimensi yang lebih luas, kompleks dan komprehensif dengan mencakup pada dimensi IPOLEKSOSBUDHANKAM. Selain itu dalam kebijakan pertahanan negara

(2021) menjelaskan bahwa perkembangan lingkungan strategis dapat memunculkan berbagai bentuk ancaman yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan ancaman actual dan potensial yang dikelompokkan sebagai berikut:

a. Ancaman aktual

Ancaman aktual merupakan ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida sebagaimana berkembang saat ini, dan cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, antara lain: wabah penyakit/pandemic (Covid-19), konflik Laut China Selatan, merosotnya pertumbuhan ekonomi, pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata, perompakan, pembajakan dan penyanderaan WNO, terorisme dan radikalisme, ancaman siber, ancaman intelijen atau *spionase*, ancaman perang psikologikal, serangan senjata biologis, bencana alam dan lingkungan dan pencurian kekayaan alam, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, imigran asing, serta dampak lahirnya revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 yang ditandai dengan kondisi mudah bergejolak (*volatility*), muncul ketidakpastian (*uncertainty*) disana-sini, kompleksitas (*complexity*) persoalan serta ketidakjelasan (*ambiguity*) atas situasi yang berkembang.

b. Ancaman Potensial

Ancaman potensial merupakan ancaman yang belum terjadi, tetapi sewaktu-waktu dapat terjadi dalam situasi tertentu menjadi ancaman actual. Ancaman tersebut diantaranya berupa perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing), kelangkaan pangan, energi, sumber daya air, kesehatan, dan ancaman senjata nuklir. (Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 487 Tahun 2020)

### c. Ancaman Hibrida

Hakikat ancaman yang dinamis memungkinkan terjadinya penggabungan dari ancaman militer dan nirmiliter yang disebut dengan ancaman hibrida. Ancaman hibrida antara lain mengkombinasikan antara ancaman konvensional, asimetrik, teroris dan *cyber warfare*, serta kriminal yang beragam dan dinamis. Selain berbagai kombinasi ancaman tersebut, ancaman hibrida dapat juga berupa keterpaduan serangan antara penggunaan senjata kimia, biologi, nuklir dan bahan peledak (*Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive /CBRNE*), dan perang informasi (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Ada beberapa istilah yang digunakan oleh negara-negara dalam mendefinisikan istilah hibrida ini. seperti halnya yang diistilahkan oleh china yang menganggap filosofi hibrida ini merupakan peperangan tanpa batas. Peperangan ini sesuai dengan pemahaman Cina yaitu berbicara tentang taktik zona hibrida/abu-abu. Peperangan semacam ini tidak memiliki batasan yang di tempatkan pada batasan/cara/metode apapun untuk mencapai apa yang menurut bangsa itu dibenarkan. Sampai-sampai budaya dan agama pun tidak luput dari jangkauannya.

Dalam perspektif intelijen terdapat istilah gangguan nyata atau ancaman factual. Dimana dalam buku Komunikasi dalam Kinerja Intelijen Keamanan (2013) menjelaskan bentuk gangguan nyata atau ancaman factual dapat berupa penipuan, perampokan, penyelundupan bom, kecelakaan lalu lintas atau bencana alam, maka gangguan nyata atau ancaman factual ini merupakan sesuatu yang sudah terjadi (Kertopati, 2013).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disintesis bahwa ancaman merupakan bentuk tindakan maupun sikap yang dapat membahayakan tujuan nasional NKRI. Ancaman dapat dibagi kedalam tiga jenis yaitu ancaman militer, nirmiliter, dan ancaman hibrida. Ancaman tersebut lalu

dapat dikategorisasi ke dalam bentuk ancaman yang actual dan bentuk ancaman potensial sehingga dengan adanya perkembangan lingkungan strategis yang terjadi saat ini dapat menjadikan ancaman mengarah pada dimensi yang lebih luas mencakup pada bidang ipoleksosbudhankam.

### **2.1.3 Konsep Perang Kognitif**

Perang kognitif (*Cognitive warfare*) merupakan model perang paling modern di dunia saat ini. Metode perang ini lebih unggul, mendalam dan luas dari perang syaraf yang dilancarkan dengan mengelola pemahanan dan interpretasi (Parstoday, 2020). Dalam praktiknya, perang kognitif ini tidak hanya menjadikan fikiran sebagai target utama dalam setiap tindakan seseorang, akan tetapi mengarah juga pada aspek psikis, emosi dan hati dari manusia itu sendiri. Secara umum, definisi dari kognitif itu sendiri adalah suatu proses atas perubahan dalam mempersepsi dan memahami suatu hal. Dalam perang kognitif, pikiran manusia menjadi medan perangnya, dengan tujuan untuk dapat mengubah terkait pola fikir dan tindakan seseorang. Jika hal tersebut berhasil dilakukan, maka hal tersebut akan membentuk dan mempengaruhi keyakinan dan perilaku individu dan kelompok untuk mendukung tujuan taktis atau strategis agresor. Dalam buku yang berjudul *Fall 2020 Cognitive Warfare an Attack on Truth and Thought* (2020) menjelaskan “*cognitive warfare is the weaponization of public opinion by an external entity, for the purpose of influencing public and/or governmental policy or for the purpose of destabilizing governmental actions and/or institutions.*”, yang dapat diterjemahkan “perang kognitif adalah persenjataan opini publik oleh entitas eksternal, untuk tujuan mempengaruhi publik dan/atau kebijakan pemerintah atau untuk tujuan destabilisasi tindakan pemerintah dan/atau lembaga-lembaga.” (Bernal, Carter, Singh, Et al 2020). Perang kognitif merupakan konvergensi dari semua elemen yang telah hidup gelisah di bawah moniker *catch-all* dari sejak munculnya istilah *Information Warfare (IW)* pada 1990-an (Bienvenue, Rogers, & Troath, (2018). Dalam NATO review yang ditulis oleh *Johns Hopkins University & Imperial College London*, Perang kognitif

mengintegrasikan kemampuan cyber, informasi, psikologis, dan rekayasa sosial untuk mencapai tujuannya (NATO Review ,2021). Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan internet dan media sosial untuk menargetkan individu yang berpengaruh, kelompok tertentu, dan sejumlah besar warga secara selektif dan berurutan dalam suatu masyarakat. Kemajuan dalam bidang ilmu saraf telah memungkinkan kemajuan besar dalam memahami cara kerja otak, menghasilkan perhatian yang berkembang pada konsep perang kognitif. Di luar domain fisik dan virtual, alat peretasan sekarang dapat digunakan untuk tujuan politik untuk mendistorsi gambar, memproduksi, dan menyebarkan berita palsu (Kasapoglu & Kirdemir 2019) melalui taktik seperti pengumpulan data yang ditargetkan, pembuatan konten, dan amplifikasi palsu, sehingga mengambil keuntungan dari bias kognitif yang melekat dan banyak orang, serta kerentanan kognitif untuk memanipulasi narasi yang diberikan. Dalam NATO *Review* (2021) menjelaskan bahwa tujuan perang kognitif dapat dibatasi, dengan cakrawala waktu yang singkat. Atau mereka bisa strategis, dengan kampanye yang diluncurkan selama beberapa dekade. Satu kampanye dapat berfokus pada tujuan terbatas untuk mencegah terjadinya manuver militer seperti yang direncanakan, atau untuk memaksa perubahan kebijakan publik tertentu. Beberapa kampanye berturut-turut dapat diluncurkan dengan tujuan jangka panjang untuk mengganggu seluruh masyarakat atau aliansi, dengan menyebarkan keraguan tentang pemerintahan, menumbangkan proses demokrasi, memicu gangguan sipil, atau menghasut gerakan separatis (Johns Hopkins University & Imperial College London, 2021).

Perang kognitif dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai saluran media. Dengan memanfaatkan keterbukaan platform media sosial memungkinkan musuh dengan mudah menargetkan individu, kelompok terpilih, dan publik melalui pesan sosial, mempengaruhi media sosial, merilis dokumen secara selektif, berbagi video, dan lain sebagainya. Kemampuan dunia maya memungkinkan penggunaan *spearfishing*,

*hacking*, pelacakan individu dan jaringan sosial. Target dari perang kognitif ini yaitu kognisi manusia melalui manipulasi di bidang informasi sehingga dapat berdampak pada perilaku manusia. Ancamannya lebih dari sekedar kerusakan yang dihasilkan oleh manipulasi informasi, dimana pola pikir manusia menjadi target dari musuh dengan menggunakan senjata dalam bentuk lainnya. Contohnya dengan menggunakan narasi-narasi dan memanfaatkan banjirnya informasi di media yang menyebabkan bias kognitif secara masal.

#### **2.1.4 Komunikasi Politik**

Teori komunikasi politik merupakan suatu proses pendistribusian simbol-simbol berupa pesan politik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok terhadap individu lain atau kelompok lain guna dapat memberikan pengaruh terhadap cara bersikap dan bertindak dari target komunikasi politik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Dan Nimmo menjelaskan bahwa komunikasi politik adalah cara seseorang bertukar simbol, kata-kata yang dituliskan dan diucapkan, gambar, gerakan, sikap tubuh, perangai dan pakaian (Nimmo, 2000). Melihat definisi dari tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik merupakan sebuah pesan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada individu lain melalui pertukaran simbol dan dapat memberikan dampak pada politik dan sistem politik. Jika komunikasi yang berkaitan dengan politik semakin jelas, maka komunikasi yang diedarkan secara menyeluruh dapat disimpulkan sebagai komunikasi politik.

Elemen komunikasi politik digunakan sebagai suatu aktifitas yang dilakukan oleh aktor politik maupun politikus dalam mencapai tujuannya, sehingga komunikasi politik memiliki fungsi sebagai sarana untuk dapat mempengaruhi sistem politik. Hal tersebut juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh Almond dan Powell yang menempatkan komunikasi politik sebagai salah satu fungsi politik, bersama-sama dengan fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutmen yang terdapat dalam suatu sistem

politik (Wahid, 2016). Penjelasan tersebut memperkuat pemahaman bahwa komunikasi politik memiliki fungsi dalam suatu sistem politik.

Mc. Nair (2003) dalam *An Introduction to Political Communication*, mendefinisikan komunikasi politik sebagai “purposeful communication about politics” yang meliputi:

1. Semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh para politisi dan aktor-aktor politik lainnya dengan maksud mencapai tujuan tertentu
2. Komunikasi Politik ditujukan oleh aktor-aktor tersebut kepada non-politisi, seperti pemilih dan kolumnis surat kabar
3. Komunikasi tentang aktor-aktor tersebut, dan kegiatan-kegiatan mereka, seperti termuat dalam berita, editorial dan bentuk-bentuk media lainnya mengenai politik.

McNair juga menjelaskan bahwa objek yang dikaji dalam kegiatan komunikasi politik mempunyai tiga elemen, yaitu:

1. *Political organizations*: partai politik, organisasi publik, *pressure group*, *terrorist organizations*, dan *governments*.
2. Media.
3. Masyarakat (citizens).

Komunikasi memiliki peran dengan memanfaatkan beragam bentuk dan level saluran komunikasi politik. Media massa dan dengan kehadiran media baru menjadi saluran yang digunakan untuk memberikan pengaruh dalam setiap dinamika peristiwa politik saat ini.

Pengaruh dari komunikasi politik ini dilakukan dengan menggunakan berbagai macam saluran komunikasi massa. Saluran-saluran tersebut diantaranya media internet seperti media sosial dan media konvensional seperti media cetak dan elektronik. Hal tersebut digunakan oleh banyak aktor politik dalam menyampaikan pesannya untuk dapat mempengaruhi publik. Saluran komunikasi politik ini dianggap sangat penting karena dapat menjembatani transformasi ide, kepentingan dan tujuan politik dengan memberikan pesan sehingga dapat memberikan pengaruh dalam pembentukan opini publik dan dampak terbutuknya adalah

dapat mengubah sikap dan perilaku politik dari publik dengan menggunakan komunikasi politik. Bagi negara yang menganut sistem demokrasi, kebebasan mengemukakan pendapat merupakan sebuah elemen yang sangat penting karena hal tersebut bersinggungan dengan upaya pengawasan terhadap pemerintah agar terciptanya *check and balances* dalam menjalankan pemerintahan. Akan tetapi, proses komunikasi yang sangat terbuka, rentan akan terjadinya konflik. Komunikasi yang terbuka dapat memberikan ruang perdebatan dalam upaya memenangkan kepentingan politik dengan tujuan untuk menguasai seluruh komponen yang dimiliki oleh negara. Tujuan dicapai acapkali memunculkan konflik diantara para pihak karena kepentingan dan pemahaman yang berbeda (Wahid, 2016).

Komunikasi politik yang merupakan suatu perwujudan komunikasi diarahkan pada upaya menghasilkan pengaruh yang sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama. Dalam buku *Political Communication and Public Opinion in America* (1978), Dan Nimmo menjelaskan bahwa kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik didasarkan pada konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik. Komunikasi politik merupakan prasyarat yang diperlukan bagi berlangsungnya fungsi-fungsi yang lainnya. Galnoor menyebutkan bahwa komunikasi politik adalah infrastruktur politik, yaitu sebuah kombinasi berbagai interaksi sosial di mana informasi yang saling berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan ke dalam peredaran (Arifin, 2003).

Dilihat dari tujuannya, komunikasi politik yang dilakukan oleh komunikator politik yaitu dengan cara memberikan pesan politik kepada publik untuk membentuk suatu citra politik, mempengaruhi opini, dan digunakan juga untuk dapat melakukan *counter* informasi dari komunikator politik lainnya. Komunikasi politik juga memiliki tujuan untuk dapat menarik

partisipasi publik dalam konteks politik pada saat penyelenggaraan pemilihan umum baik tingkat daerah maupun tingkat pusat. Ada beberapa tujuan komunikasi politik diantaranya (Arifin, 2006):

a. Membangun Citra Politik

Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membangun citra politik yang baik bagi khalayak. Citra politik itu terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima, baik langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. Sementara menurut Dan Nimmo (2000) menjelaskan bahwa citra politik terjalin melalui pikiran dan perasaan secara subjektif yang akan memberikan penilaian dan pemahaman terhadap peristiwa politik tertentu.

b. Membentuk dan Membina Pendapat Umum

Pembentukan pendapat umum dalam komunikasi politik, sangat ditentukan oleh peranan media politik terutama media massa. Penggunaan media massa seperti pers, televisi, radio dan yang lainnya, selain memiliki fungsi sebagai sarana informasi dengan berbagai konten yang mendidik dan menghibur, media massa juga dapat membentuk citra politik dan pendapat umum yang merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan politik.

c. Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik

Partisipasi politik sebagai tujuan komunikasi politik dimaksudkan agar individu-individu berperan serta dalam kegiatan politik (partisipasi politik). Sehingga salah satu bentuk partisipasi politik yang penting adalah ketika seseorang (khalayak) mau memberikan suaranya untuk seorang politikus maupun partai politik tertentu dalam pemilihan umum.

Dalam proses aktivitas komunikasi politik sangat penting untuk mengetahui dan memahami keterlibatan unsur-unsur komunikasi politik agar

aktivitas politik dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik. Unsur-unsur komunikasi politik Menurut Nimmo (1993) yaitu:

1. Komunikator politik,

Komunikator politik pada dasarnya adalah semua orang yang berkomunikasi tentang politik. Dalam politik, para pemimpin dan pejabat politik menjadi komunikator utama karena mereka secara aktif mampu menciptakan pesan politik sesuai dengan kepentingan politiknya. Lalu komunikator utama ini masuk pada kategori *pol*s yang memiliki arti bahwa mereka dalam hidup dengan cara memanipulasi komunikasi. Selanjutnya ada kategori *Vols* yang merepresentasikan bahwa mereka adalah masyarakat yang secara sukarela, aktif di berbagai aktifitas politik. Komunikator politik memainkan peran utama dalam aktifitas sosial dan politik, terutama dalam pembentukan opini publik. Pihak yang secara aktif menciptakan opini publik ini adalah mereka yang menjadi pemimpin di organisasi politik, mereka yang tergabung dalam juru bicara partai politik dan mereka yang tergabung dalam aktifitas partai politik. Tujuan mereka adalah untuk dapat. Karena itu, Dan Nimmo berpandangan bahwa sikap terhadap khalayak serta martabat yang diberikannya kepada mereka sebagai manusia dapat mempengaruhi komunikasi yang dihasilkannya (Nimmo, 2005). Sehingga munculnya berbagai tanggapan atas apa yang publik pahami ditandai dengan munculnya ide, gagasan, argumen dan pemikiran baru.

2. Pesan Komunikasi Politik

Pesan yang dihasilkan dari para peserta komunikasi banyak bentuknya serta menghasilkan berbagai makna, struktur, dan akibat. Pesan adalah content atau isi dari komunikasi yang dikemas sebagai suatu berita, informasi dan isu yang didalamnya memiliki muatan politik. Pesan politik dikemas menjadi suatu

informasi dan disebarakan melalui berbagai media, baik media berjejaring internet maupun media konvensional. Dalam komunikasi politik, pesan politik adalah hal terpenting, dimana dalam pesan politik yang dikemas menjadi suatu informasi yang didistribusikan oleh komunikator politik memiliki tujuan yang mengarah pada upaya pencarian persamaan persepsi dengan penerima informasi atau komunikan. Upaya itu dilakukan dengan cara mengemukakan ide dan gagasan ke publik agar dapat menjadi perbincangan di tataran publik. ada beberapa jenis pesan politik yang dijelaskan oleh Dan Nimmo (2006) sebagai berikut:

a. Retorika

Retorika merupakan cara yang digunakan dengan memanfaatkan kemampuan berkomunikasi dengan dilandaskan dengan kemampuan dalam mengolah bahasa agar komunikasi yang terbangun adalah komunikasi yang persuasif dan efektif. Retorika dapat mengandung arti sebagai suatu bentuk komunikasi yang terjadi secara dua arah, bisa dalam bentuk komunikasi antar personal atau dalam bentuk komunikasi kelompok bahkan publik. Tujuan dari retorika ini yaitu untuk dapat mempengaruhi lawan bicara sehingga mendapatkan persamaan persepsi sesuai dengan keinginan komunikator.

b. Iklan Politik

Iklan politik merupakan sarana yang digunakan dalam melakukan perkenalan terhadap pesan politik yang dibawa agar dapat tujuan yang diharapkan oleh komunikator dapat tercapai. Upaya yang dilakukannya adalah dengan cara memperkenalkan produk politik baik partai politiknya, maupun ide dan gagasan partai politik nya agar dapat mempengaruhi publik sehingga publik dapat mengenal dan dapat

mempercayai apa yang ditampilkan dalam iklan politik tersebut, yang intinya adalah dapat meraup suara yang banyak dari publik untuk kepentingan kekuasaan yang dituju oleh partai politik tersebut.

c. Propaganda

Propaganda merupakan upaya komunikasi yang memiliki karakteristik paling masif digunakan dalam politik. Tujuan dari pesan politik berbentuk propaganda ini adalah mempengaruhi opini publik dengan menciptakan opini melalui pesan yang bermuatan doktrin politik. Sehingga dengan distribusi pesan yang begitu banyak akan menghasilkan penggiringan opini akibat persepsi publik atas pesan politik yang disampaikan.

3. Media komunikasi politik

Media dalam komunikasi politik memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi publisitas politik terhadap masyarakat luas. Siapapun komunikator atau aktivis politik akan berusaha menguasai media. Dalam buku *Komunikasi Politik, Teori, konsep, dan Aplikasi pada Era Media Baru* yang ditulis oleh Umaimah Wahid (2018) dijelaskan bahwa Saluran komunikasi politik dapat berlangsung pada komunikasi interpersonal, kelompok, organisasi, massa, dan masyarakat (Wahid, 2018).

Sedangkan dimensi dari saluran komunikasi politik terdiri atas lambang-lambang pembicaraan politik, seperti kata, gambar, dan tindakan. Kombinasi dari ketiganya akan menghasilkan cerita, foto, dan drama yang bermuatan politik (Nimmo, 2000). Artinya, setiap proses politik memerlukan saluran dan media komunikasi untuk lebih mudah menyampaikan pesan-pesan politik kepada khalayak dengan beragam bentuk dan tujuan komunikator politik (Wahid, 2016).

#### 4. Khalayak komunikasi politik

Jika memandang dari sisi politik, pengertian khalayak berarti individu atau kelompok masyarakat yang menerima informasi berupa komponen pesan-pesan politik. Dalam pembahasan ini, pembicaraan mengenai khalayak akan difokuskan pada khalayak dalam arti masyarakat luas atau sering kita sebut publik. sebagai suatu istilah, publik atau khalayak menunjuk pada pengelompokan dan pengorganisasian orang-orang dengan kepentingan yang sama. Publik atau khalayak adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang dihadapkan pada isu (permasalahan) yang sulit serta saling berbeda pendirian dan pendapat serta pemecahannya, karena itu terlibat dalam suatu diskusi (Wahid, 2016). Hubungan jiwa masing-masing individu adalah antagonis. Khalayak selalu menghadapi suatu dilemma bagaimana bisa memperoleh uniformitas dan bisa bertindak keluar sebagai kesatuan (Sobur, 2014).

Khalayak komunikasi politik dibagi menjadi beberapa tipe, hal tersebut dijelaskan oleh Dan Nimmo (2006) sebagai berikut:

- b. Publik atentif yaitu publik yang dibedakan berdasarkan tingkatan dalam keterlibatan politik, dalam memaknai informasi dan dalam berfikiran tentang kewarganegaraan.
- c. Publik berpikiran isu merupakan bagian dari publik atentif yang pada dasarnya mereka memiliki ketertarikan kepada isu-isu politik yang ada dibandingkan dengan politik secara umumnya.
- d. Publik ideologis yaitu mereka-mereka yang tergabung dalam suatu kelompok dengan memiliki tingkat kepercayaan yang tidak terbuka dan dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu didasari dengan alasan suka dan tidak suka dengan

mengedepankan tingkat masuk akal dan tidaknya sesuatu tersebut sehingga tidak bersinggungan satu sama lain.

#### 5. Efek Komunikasi Politik

Pesan politik yang disebarakan dalam berbagai saluran media komunikasi politik tentunya memiliki dampak komunikasi politik, dimana dampak tersebut dapat menjadi suatu penilaian terhadap tingkat kesuksesan dari pesan politik yang disampaikan dengan berdasarkan pada seberapa kuat efek dalam mempengaruhi opini publik, sehingga indikator nya adalah opini publik yang muncul secara positif dapat sesuai dengan keinginan komunikaotr, yaitu terciptanya perbincangan positif terhadap mereka, dan opini negatif akan berpengaruh pada pembentukan sikap dan tindakan yang negative juga. Hal tersebut semata-mata agar mendukung keinginan komunikator, akan tetapi jika opini negatif secara terus menerus muncul dalam perbincangan publik dapat berdampak pada stabilitas masyarakat dan menimbulkan perpecahan.

Adapun beberapa tahapan dan jenis dari komunikasi politik yang terjadi akibat proses dan tindakan politik yang dijelaskan oleh Umaimah Wahid (2016) sebagai berikut:

##### a. Kognitif

Efek kognitif yaitu efek komunikasi politik yang berlangsung pada level pemikiran

##### b. Afektif

Efek afektif yaitu efek komunikasi pada level emosional/perasaan/sikap.

##### c. Konatif/ behavioral

Behavioral yaitu efek komunikasi pada level perilaku.

Komunikasi politik juga memiliki efek yang sangat penting pada praktik politik, yang diantaranya adalah sosialisasi politik, partisipasi politik,

upaya mempengaruhi pemilu, dan upaya mempengaruhi pejabat. Komunikasi politik terjadi dengan dilakukannya komunikasi dua arah antara warga negara dan pejabat. Dalam konsep komunikasi organisasi, dalam mempengaruhi perjabat dicirikan dengan model komunikasi vertical. Dalam fungsi komunikasi vertical ini terdapat dua arus yaitu *downward communication* dan *upward communication*. Menurut Susaningtyas dalam bukunya komunikasi dalam kinerja intelijen keamanan menjelaskan bahwa *downward communication* terjadi ketika atasan mengirimkan pesan kepada bawahannya, sementara *upward communication* terjadi ketika bawahan mengirimkan pesan kepada atasannya (Kertopati, 2013). Selanjutnya Susaningtyas (2013) menjelaskan bahwa pada komunikasi dua arah, penerima pesan dapat diperjelas sebab suatu respon diharapkan kemunculannya. Komunikasi dua arah ini memungkinkan *misunderstanding/kesalahpahaman* dapat dijernihkan. Dalam setiap kajian komunikasi politik, terdapat diskusi mengenai keterkaitan opini publik dan kebijakan pemerintah.

Pesan politik yang terkandung dalam informasi politik menjadi kekuatan tersendiri dalam melaksanakan komunikasi politik. Dimana pesan tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap komunikan dalam memaknai dan menginterpretasikan suatu pesan. Pesan yang dibangun dalam upaya mempengaruhi publik yaitu pesan yang merepresentasikan tujuan dari komunikator sendiri, sehingga dalam proses nya hal tersebut harus mempertimbangkan kejelasan dari apa yang difikirkan, harus sesuai dengan perasaan dan keinginan pembuat informasi agar tujuannya dapat tercapai sehingga pesan tersebut harus mampu diterapkan secara efektif oleh komunikator dalam bentuk pesan politik. David V. J. Bell mengkategorisasikan 3 jenis pembicaraan yang memiliki muatan kepentingan politik (Nimmo, 2006) diantaranya:

a. Pembicaraan Kekuasaan.

Pembicaraan ini berisi janji-janji ataupun ancaman yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat mempengaruhi orang lain.

b. Pembicaraan Pengaruh.

Pembicaraan pengaruh merupakan pembicaraan yang memengaruhi orang lain dengan nasihat, dorongan, permintaan, dan peringatan.

c. Pembicaraan Otoritas.

Pembicaraan otoritas adalah pemberian perintah.

d. Pembicaraan konflik.

Pembicaraan ini merujuk pada upaya-upaya yang dapat membuat publik berdebat karena adanya perbedaan pendapat, atas apa yang menjadi informasi yang diyakini kebenarannya oleh masing masing orang, kelompok dan publik lainnya sehingga pertentangan diantara publik terjadi. Biasanya pembicaraan konflik ini terjadi karena adanya respon terhadap suatu keputusan yang dibuat oleh para pemimpin pemerintahan.

Komunikasi politik yang tujuannya agar dapat sampai pada pembicaraan publik tentunya harus berisi pesan politik yang secara khusus diproduksi dan dipublikasi agar dapat dipahami dengan baik oleh khalayak, komunikator atau pihak yang merancang pesan disyaratkan memahami setting persoalan khalayak yang menjadi target pesan politiknya. Kemampuan interpretasi pesan politik menjadi salah satu syarat dalam mendistribusikan pesan politik yang telah dibuat. Definisi dari Interpretasi adalah kemampuan dalam pemaknaan setiap pesan yang di dapatkan dalam suatu informasi. Kemampuan interpretasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pemroduksian pesan agar sesuai dengan pemahaman dari pengalaman seseorang maupun secara kelompok. Dalam menciptakan pesan, setiap orang memiliki perbedaan dalam memahami pemilihan kalimat dalam menciptakan suatu pesan serta alasan pembuatan pesan. Aspek Psikologis sangat berpengaruh dalam pembuatan pesan sehingga hal tersebut merupakan salah satu alasan bagi komunikator poitik dalam memproduksi suatu pesan.

### 2.1.5. Media Baru

Media baru hadir pada akhir abad 20-an, dimana kehadiran media baru ini merupakan cerminan telah terjadinya peleburan media tradisional (film, gambar, musik, lisan, dan tulisan) dengan kekuatan interaktif computer dan teknologi komunikasi (Wahid, 2016). *New Media* memungkinkan seseorang mendapatkan akses informasi secara cepat dan bebas dalam media berjejaring internet karena media tersebut merupakan aspek yang paling penting. Media baru memiliki konsep yang cukup luas dan perkembangannya sangat pesat. Perkembangan media baru mengubah banyak hal seperti kebiasaan, pola hidup, dan cara berkomunikasi. Perubahan tersebut dapat memberikan dampak negatif dan positif.

Menurut McQuail (2005), kebanyakan media baru memungkinkan dilakukannya komunikasi dua arah yang bersifat interaktif yang memungkinkan pengumpulan sekaligus pengiriman informasi sehingga implikasinya beragam. Bagi produser, bisa memiliki peluang yang lebih luas untuk dikenal dan melakukan publikasi. Bagi penerbit, dapat memberikan bentuk alternative untuk melakukan komunikasi dan publikasi sehingga dapat melakukan pengeditan maupun validasi terhadap publikasinya. Produksi dan distribusi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu karena dapat memberikan informasi dalam jumlah yang sangat besar ke manapun pada waktu yang sama. Bagi penerima informasi, dapat terjadi berbagai perubahan karena kebebasan dan kesamaan dalam hubungan antara pengirim dan penerima informasi. Penerima informasi dituntut untuk membuat berbagai pilihan berdasarkan pengetahuan serta pengalaman yang harus diintegrasikan agar mampu melakukan komunikasi (Wahid, 2018).

Media baru memiliki karakteristik yang berbeda dengan media lama, dimana dalam media baru terdapat kemampuan untuk memanipulasi dengan memanfaatkan akses yang tidak ada batas dan dapat didistribusi secara cepat. karakteristik media baru ini juga menjadikan sesuatu yang

secara kapasitas besar dapat dilakukan dengan unit yang kecil, lalu adanya pemadatan dalam media baru serta dapat diakses oleh banyak orang terkait pesan-pesan dan informasi. Dengan adanya media baru memudahkan masyarakat dalam memproduksi pesan baik berupa gambar, suara, teks, video dan didistribusikan di waktu yang bersamaan tanpa mengurangi konteks dari konten serta dapat dilancarkan dalam berbagai platform media yang ada. Media baru juga memiliki karakter yang lebih interaktif dibandingkan dengan media lama, karena kemudahan pendistribusian informasi berkaitan juga dengan kemudahan dalam menerima informasi. artinya, pesan dapat mudah di respon oleh penerima informasi dalam waktu yang sama melalui percakapan yang terjadi antara pembuat informasi dengan penerima informasi, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan bebas tanpa terbatas ruang.

Hadirnya media baru memberikan dampak yang cukup besar dalam perkembangan teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi memunculkan istilah masyarakat informasi dan menuntut kita untuk mendefinisikan teori media yang ada. Menurut Ward (dalam McQuail 2011) menjelaskan bahwa teori yang ada selama ini lebih melihat keberadaan dan pengaruh media, sementara proses “informatisasi” masih belum banyak disentuh. Padahal, beragam jenis media baru yang bisa dijadikan sumber informasi melibatkan proses yang relative berbeda dengan penerimaan audiens yang berbeda pula (Wahid, 2016). Selain itu, hadirnya media baru yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi menunjukkan sifat media komunikasi yang dinamis.

Penjelasan diatas senada dengan apa yang dijelaskan oleh McQuail (dalam wahid 2016) yang melihat permasalahan utama dalam teori tentang media baru dan media lama yang selama ini berfokus pada 3 hal yaitu:

1. *Power and inequality*

Tidak mudah menempatkan media baru dalam hubungannya dengan kepemilikan dan kekuasaan, dimana isi serta arus informasi harus dikontrol.

## 2. *Social integration and Identity*

Media baru dianggap sebagai kekuatan yang mampu melakukan disintegrasi terhadap kohesivitas sosial di dalam masyarakat karena dianggap terlalu individualistis dan bisa menembus batas ruang, waktu, serta budaya.

## 3. *Social Change*

Media baru dianggap sebagai agen perubahan sosial sekaligus agen perubahan ekonomi yang terencana, dimana tidak adanya control pesan, baik dari pemberi maupun penerima pesan, sangat mungkin terjadi. Masyarakat informasi memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada media.

Kehadiran media baru telah mengubah aktifitas kehidupan manusia. Karakteristik media baru sangat menguntungkan masyarakat, mengingat masyarakat dapat dengan mudah dan cepat dalam mengakses sesuatu dan tidak menggunakan biaya yang mahal. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan jumlah penggunaanya yang meningkat tajam. Saat ini semua lapisan masyarakat menggunakan media massa sebagai ruang untuk mendapatkan informasi. Perkembangan teknologi informasi menjadikan masyarakat memiliki perbedaan dalam menggunakan teknologi komunikasi. Menurut Theodore H. Corn (dalam *Global Political Economy: Theory and Practice*, 2002) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan globalisasi, termasuk dalam politik. Peristiwa-peristiwa politik dunia menjadi konsumsi bersama masyarakat dunia. Karakteristik media baru yang dapat di akses dengan cepat dan mudah dengan didukung jangkauan yang luas menjadikan media baru ini dimanfaatkan oleh komunikator politik dalam mempengaruhi publik.

Di era digital seperti saat ini menjadikan proses komunikasi politik bukan hanya mengubah pola pikir dan perilaku media serta masyarakat sebagai khalayak politik, melainkan dapat juga merubah pemahaman mengenai pesan, komunikator, dan pengaruh yang ditimbulkan oleh proses komunikasi politik yang berlangsung. Dalam buku *Communities in*

*Cyberspace* menjelaskan bahwa komunikasi cyberspace akibat media baru dan media digital memunculkan empat hal penting, yaitu *identity, social order and control, community structure and dynamics*, dan *collective action* (Smith dan Kollock, 1999). Smith dan Kollock juga menjelaskan bahwa media baru dan media sosial menciptakan komunitas cyberspace, yaitu sebuah komunitas dunia baru yang mempunyai koneksi jaringan satu dengan yang lainnya tanpa batas waktu dan ruang. Komunitas cyber ini digunakan oleh komunikator untuk dapat menyampaikan pesan-pesan, termasuk pesan politik. Istilah *buzzer* menjadi satu hal yang paling menarik dalam perkembangan yang terjadi khususnya terkait pengaruh yang dilakukan melalui pesan-pesan politik kepada khalayak.

Terjadi perubahan pola saluran komunikasi politik dengan adanya media baru, sehingga menyebabkan pola komunikasi memiliki perubahan yang sangat signifikan. Media sosial telah dijadikan sebagai saluran dalam proses politik dengan dilakukan secara intens dan sebagai ruang dalam melakukan sosialisasi, ruang penyampaian, upaya mempengaruhi, dan mengkontruksi opini publik. Hal tersebut didasari dengan meningkatnya pengguna media sosial secara signifikan ditunjang dengan fasilitas jaringan internet yang semakin merata. Peran media sosial dalam upaya mempengaruhi masyarakat terlihat dari dijadikannya media sosial sebagai tempat berdialog terkait perbedaan pendapat. Selain itu media sosial juga dijadikan ruang dalam menghimpun aspirasi masyarakat yang ingin ikut membangun sistem politik

## **2.2. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Sebelum peneliti memaparkan analisis dalam penelitian. Terdapat beberapa literatur penelitian yang menggunakan tema bahasan tentang perang kognitif, sebagai bahan perbandingan dan referensi. Penelitian yang akan dilakukan harus berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penulisan tesis ini. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Teori dan Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Alexandra Borgeaud dit Avocat (2021)	<i>Cognitive Warfare: The Battlefield of Tomorrow?</i>	Teori yang digunakan adalah teori ancaman dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perang kognitif, alat peretasan dapat digunakan untuk tujuan politik dengan cara mendistorsi gambar, menghasilkan, dan menyebarkan berita palsu melalui taktik seperti pengumpulan data yang ditargetkan, pembuatan konten, dan amplifikasi palsu. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memanipulasi opini publik dan memenangkan peperangan tanpa bersentuhan fisik. Perlu adanya suatu tata kelola kebijakan dalam mengantisipasi perang kognitif yang merupakan fenomena baru.	Membahas mengenai ancaman ke depan terkait tema yaitu perang kognitif	Peneliti berfokus pada ancaman perang kognitif yang telah terjadi dan tidak hanya mengarah pada sistem pemerintahan, melainkan membahas juga mengenai ancaman pada sistem politik dan pertahanan negara.
2.	Alonso Bernal, dkk (2020)	<i>Fall 2020 Cognitive Warfare an Attack on Truth and Thought</i>	Teori yang digunakan adalah teori pengaruh dengan metode	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perang kognitif merupakan senjata opini publik oleh entitas eksternal dengan tujuan untuk dapat mempengaruhi kebijakan publik dan pemerintah, dan menggoyahkan institusi publik.	Membahas tema yang sama yaitu perang kognitif.	Peneliti membahas mengenai ancaman perang kognitif pada penyelenggaraan pilkada di Indonesia dengan studi kasus pilkada DKI Jakarta

			penelitian Kualitatif	Destabilisasi dan pengaruh adalah tujuan mendasar dari perang kognitif dengan cara menabur ketidakpuasaan dalam masyarakat atau mendorong keyakinan dan tindakan tertentu.		tahun 2017. Peneliti akan berfokus pada pengaruh perang kognitif dalam proses demokrasi di Indonesia
3.	David Siman-Tov (2019)	<i>Disinformation Campaigns and Influence on Cognition: Implications for State Policy</i>	Teori yang digunakan adalah teori Strategi dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif demokrasi khususnya pemilu, perang kognitif dapat mempengaruhi proses pemilihan dengan penyisipan konten tertentu, serangan teknologi, atau kombinasi keduanya, sehingga mencoba memperdalam keretakan sosial yang ada. Perang kognitif dapat merongrong kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Penyebaran informasi yang tidak benar mengenai perilaku para tokoh dalam sistem demokrasi dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi dan proses demokrasi pada umumnya, serta merusak eksistensi demokrasi itu sendiri. Penyebaran informasi yang salah dan bias tentang isu-isu strategis dapat	Membahas mengenai upaya mempengaruhi kognisi melalui saluran informasi	Peneliti tidak hanya fokus membahas mengenai kebijakan suatu negara, akan tetapi peneliti juga akan fokus membahas mengenai fenomena perang kognitif dalam aspek demokrasi.

				merusak persepsi tentang isu-isu ini. Mendistorsi persepsi publik tentang realitas dalam sistem demokrasi dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam rezim demokrasi, mengingat kebutuhan untuk menerima legitimasi publik atas keputusan tersebut		
4.	Oliver Backes dan Andrew Swab (2019)	<i>Cognitive Warfare: The Russian Threat to Election Integrity in the Baltic States</i>	Teori yang digunakan adalah teori strategi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh operasi perang kognitif terhadap integritas pemilu lebih besar daripada ancaman yang ditimbulkan oleh kemampuan siber. risiko siber yang paling signifikan terhadap integritas pemilu berasal dari perlindungan keamanan siber yang tidak memadai yang diterapkan oleh aktor-aktor lain yang relevan secara politik, terutama kampanye politik, partai politik, dan media.	Menjadikan sistem pemilu sebagai objek dalam melaksanakan operasi perang kognitif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi di ruang siber.	Peneliti tidak hanya berfokus pada aktor eksternal dalam upaya melakukan operasi perang kognitif, peneliti juga akan membahas mengenai peran dari aktor yang ada di internal.
5.	Diana Mackiewicz (2018)	<i>COGNITIVE WARFARE: Hamas &amp; Hezbollah</i>	Teori yang digunakan adalah teori	Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini, banyak audiens yang ditarik ke dalam pusaran misrepresentasi dan penipuan	Membahas tema yang sama yaitu perang kognitif	Peneliti lebih fokus membahas mengenai ancaman perang kognitif pada proses

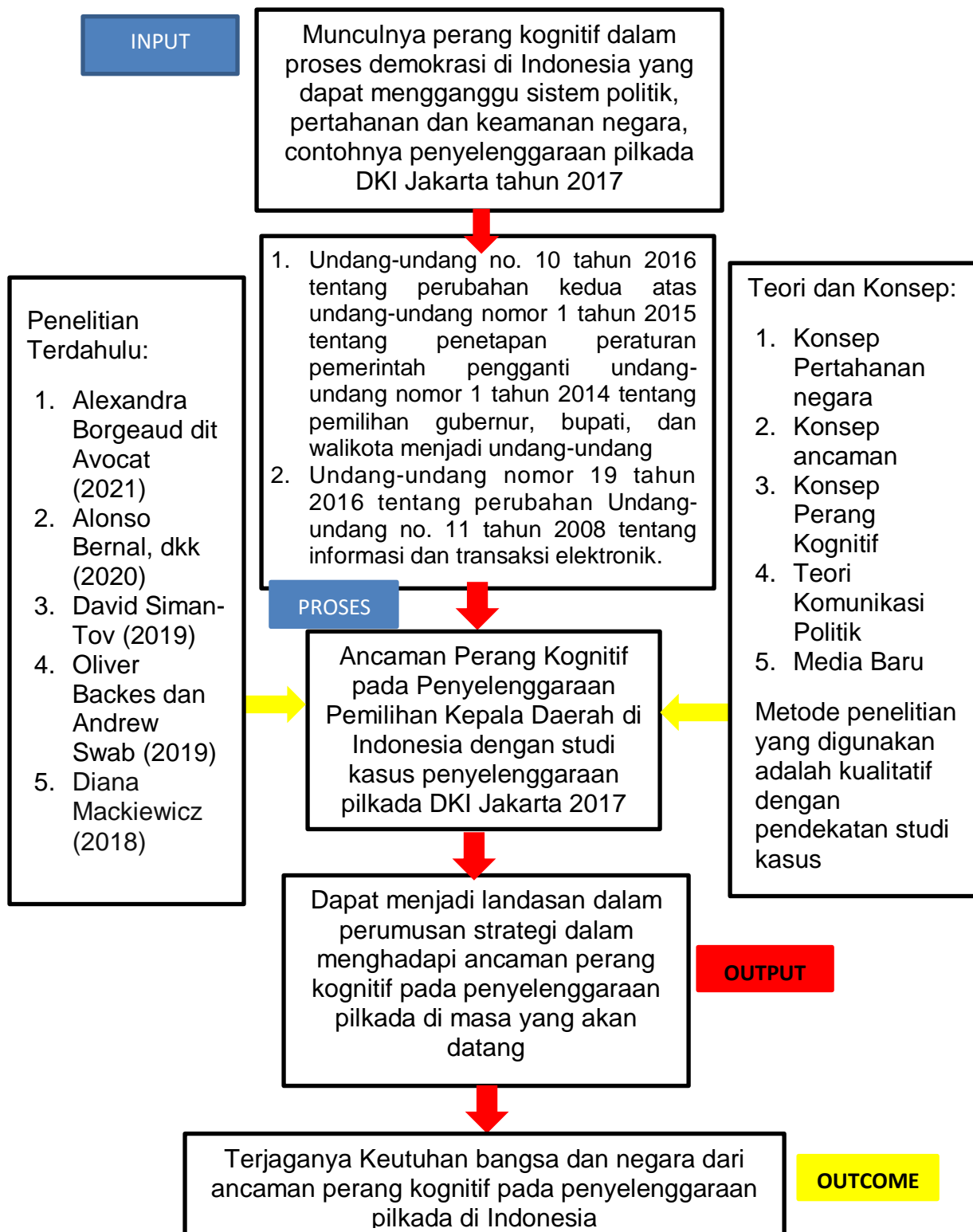
		<i>and their insidious efforts</i>	komunikasi dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif	ketika perang kognitif secara rutin dipraktekkan. Pemirsa yang rentan adalah mereka yang mengkonseptualisasikan dan mengumpulkan informasi lebih banyak dari gambar daripada dari bahasa, audiens yang telah dibesarkan dalam perspektif sektarian yang mengurangi kemungkinan resolusi, dan audiens asing yang tidak memiliki informasi latar belakang untuk menganalisis produk secara kritis dan menyangkal pesannya.		demokrasi di Indonesia yaitu terkait penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Pembahasan ancaman perang kognitif ini akan dikaitkan dengan penggunaan saluran media baru.
--	--	------------------------------------	--	--	--	--

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021.

Dari beberapa penelitian yang digunakan sebagai tinjauan, penulis fokus dalam segi objek penelitian yang memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu tentang ancaman perang kognitif pada penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Selain itu peneliti juga fokus pada bagaimana perang kognitif yang terjadi pada penyelenggaraan pilkada di DKI Jakarta tahun 2017.

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini, berfokus pada aspek yang akan diteliti dan telah diuraikan dalam rumusan masalah yaitu mengenai Ancaman Perang Kognitif pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dengan studi kasus penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Kedua rumusan masalah tersebut merupakan *input* yang akan diproses menggunakan 3 konsep dan 2 teori, yaitu konsep pertahanan negara, konsep ancaman, konsep perang kognitif, teori komunikasi politik, dan teori media baru yang digunakan sebagai dasar untuk meneliti guna menjawab rumusan masalah yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan output atau jawaban dari pertanyaan penelitian. *Output* dalam penelitian ini yaitu dapat menjadi landasan dalam perumusan strategi dalam menghadapi ancaman perang kognitif pada penyelenggaraan pilkada di masa yang akan datang. *Output* ini diharapkan dapat memberikan *Outcome* sehingga terjaganya kedaulatan bangsa dan negara dari ancaman perang kognitif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021.*